

# **ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DENGAN TURKI TERKAIT DENGAN PENGADAAN ALUTSISTA MEDIUM TANK HARIMAU**

**Priyo Iswahyudi<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

## **ABSTRACT**

Indonesia has increasingly pursued defense diplomacy as a strategic instrument to advance its national defense modernization agenda. This study examines Indonesia's partnership with Turkiye in the joint development of the Medium Tank "Harimau" as a case of techno-nationalist defense cooperation. Drawing on a neorealist perspective and Bitzinger's techno-nationalism framework which emphasizes the pursuit of power, wealth, and prestige the research explores Indonesia's motivations for selecting Turkiye as a defense partner. The findings suggest that this cooperation aims to reduce foreign dependency, enhance indigenous defense industrial capacity, and strengthen Indonesia's geopolitical standing. Employing a qualitative-descriptive method, this research relies on document-based analysis of official agreements, laws, and defense policy reports. It highlights the strategic significance of the industrial collaboration between PT PINDAD and FNSS Defense Systems Turkiye. The co-production of the Harimau tank is not merely a procurement arrangement but a reflection of Indonesia's aspiration toward self-sufficiency, technological sovereignty, and recognition as a credible regional military power.

**Keywords:** Defense Diplomacy; Indonesia-Turkiye; Harimau Tank; Techno-nationalism; Military Cooperation

## **ABSTRAK**

Indonesia semakin mengintensifkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda modernisasi pertahanan nasional. Kajian ini menelaah kemitraan Indonesia dengan Turki dalam pengembangan bersama Medium Tank "Harimau" sebagai bentuk kerja sama pertahanan berbasis techno-nasionalisme. Dengan menggunakan perspektif neorealisme dan kerangka techno-nationalism dari Bitzinger yang menyoroti tiga motif utama negara, yaitu pencapaian kekuatan (power), keuntungan ekonomi (wealth), dan prestise internasional (prestige) penelitian ini mengidentifikasi alasan strategis di balik pemilihan Turki sebagai mitra pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan luar negeri, memperkuat kapasitas industri pertahanan dalam negeri, serta meningkatkan posisi geopolitik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis dokumen terhadap perjanjian resmi, regulasi, dan laporan kebijakan pertahanan. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara PT PINDAD dan FNSS Defense Systems Turki, serta menegaskan bahwa produksi bersama tank Harimau bukan sekadar strategi pengadaan, melainkan cerminan dari aspirasi Indonesia menuju kemandirian teknologi, kedaulatan pertahanan, dan pengakuan sebagai kekuatan militer kawasan yang kredibel.

**Kata Kunci:** Diplomasi Pertahanan; Indonesia-Turki; Tank Harimau; Techno-nasionalisme; Kerja Sama Militer

## **PENDAHULUAN**

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, diplomasi pertahanan telah berkembang menjadi instrumen penting dalam mengartikulasikan kepentingan strategis negara. Diplomasi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalin hubungan

bilateral, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat postur pertahanan nasional melalui kerja sama industri, transfer teknologi, dan penguatan interoperabilitas militer. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, mulai dari ancaman militer konvensional hingga dinamika geopolitik yang dipicu oleh rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia menetapkan doktrin *Minimum Essential Force (MEF)* sejak 2007 sebagai kerangka kebijakan modernisasi pertahanan jangka panjang. Namun, dalam pelaksanaannya, MEF menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan kapasitas industri pertahanan dalam negeri dan ketergantungan tinggi terhadap alutsista impor. Hal ini diperparah oleh pengalaman embargo militer Amerika Serikat pasca-reformasi yang menegaskan urgensi bagi Indonesia untuk membangun kemandirian pertahanan secara bertahap namun berkelanjutan. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan menjadi sarana alternatif untuk memenuhi kebutuhan alutsista tanpa harus mengorbankan prinsip kedaulatan dan non-alignmen.

Salah satu bentuk implementasi konkret dari strategi tersebut adalah kerja sama bilateral Indonesia dengan Turkiye dalam pengembangan Medium Tank “Harimau”. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat industri pertahanan nasional melalui skema produksi bersama (*co-production*) antara PT PINDAD dan FNSS Defense Systems Turkiye. Medium Tank Harimau, yang juga dikenal sebagai Kaplan MT, dirancang untuk memberikan solusi pertahanan yang efisien bagi kebutuhan medan tempur Indonesia dan sekaligus menjadi simbol keberhasilan diplomasi industri pertahanan berbasis teknologi. Kerja sama ini diperkuat melalui landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki tentang Kerja Sama di Bidang Industri Pertahanan.

Namun demikian, sebagian besar kajian sebelumnya terhadap proyek Medium Tank Harimau lebih berfokus pada aspek teknis atau teknologi persenjataan. Studi seperti Wahyuni (2020) dan Pratama (2022) cenderung menekankan spesifikasi senjata, keunggulan desain, dan performa taktis, tanpa menggali lebih jauh konteks diplomasi pertahanan serta strategi nasionalisme teknologi (*techno-nationalism*) yang melatarbelakanginya. Di sinilah letak ketidaksesuaian antara realitas empiris (*das sein*) yakni keberhasilan teknis proyek alutsista Bersama dengan kondisi ideal (*das sollen*) yakni pentingnya keberlanjutan strategi kemandirian pertahanan yang terpadu dengan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, terdapat celah dalam literatur yang belum mengintegrasikan kajian pertahanan dengan pendekatan hubungan internasional secara utuh. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, artikel ini mengkaji kerja sama pertahanan Indonesia-Turki dalam proyek Harimau dari perspektif neorealisme dan kerangka *techno-nationalism* yang dikembangkan oleh Bitzinger. Perspektif neorealisme digunakan untuk memahami bagaimana negara memaksimalkan kepentingan nasional dalam sistem internasional yang anarkis melalui aliansi strategis. Sementara itu, *techno-nationalism* menjadi instrumen analisis yang menjelaskan motivasi negara dalam mengejar kekuatan (*power*), keuntungan ekonomi (*wealth*), dan pengakuan internasional (*prestige*) melalui pengembangan industri teknologi pertahanan.

Artikel ini berargumen bahwa kerja sama pengadaan dan produksi tank Harimau bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan cerminan dari transformasi strategi pertahanan Indonesia menuju kemandirian dan peningkatan status internasional. Dengan demikian, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah: *Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dengan Turki dalam pengadaan Medium Tank Harimau mencerminkan strategi negara dalam mengejar kemandirian pertahanan dan pengaruh geopolitik di kawasan?*

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap dinamika, aktor, serta implikasi strategis dari kerja sama Indonesia–Turki, serta menyoroti bagaimana diplomasi pertahanan dapat berperan sebagai alat pencapaian tujuan nasional dalam konteks kompetisi kekuatan global dan regional.

## **KERANGKA ANALITIK**

Untuk memahami kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turkiye dalam proyek Medium Tank Harimau, artikel ini menggunakan pendekatan neorealisme dan kerangka pemikiran *techno-nationalism* yang dikembangkan oleh Richard A. Bitzinger. Pendekatan neorealisme dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis berupaya memaksimalkan kepentingannya melalui strategi aliansi, akumulasi kapabilitas militer, serta peningkatan otonomi strategis. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara lain, termasuk Turkiye, dapat dipahami sebagai bagian dari kalkulasi rasional Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan besar sekaligus memperkuat daya tawar di tingkat kawasan.

Di sisi lain, *techno-nationalism* memberikan dimensi tambahan dalam menganalisis kebijakan pertahanan modern. Bitzinger (2015) menjelaskan bahwa negara-negara berkembang mengadopsi strategi *techno-nationalism* untuk mengejar tiga tujuan utama, yakni kekuatan militer (*power*), keuntungan ekonomi (*wealth*), dan prestise internasional (*prestige*). Kerangka ini menyoroti bahwa pengembangan industri pertahanan bukan hanya tentang akuisisi senjata, melainkan juga tentang pembangunan kapabilitas domestik, alih teknologi, serta penguatan posisi negara di panggung global. Indonesia, dalam hal ini, tidak sekadar membeli alutsista dari Turkiye, tetapi turut serta dalam proses desain, pengujian, hingga produksi lokal, sehingga menghasilkan nilai tambah strategis yang berlapis.

Dengan menggabungkan perspektif neorealisme dan kerangka *techno-nationalism*, artikel ini menganalisis bagaimana kerja sama Indonesia–Turki dalam proyek Harimau mencerminkan strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal dan membangun kemandirian alutsista. Kerangka ini juga membantu menjelaskan bagaimana kerja sama semacam ini dapat menjadi model diplomasi pertahanan yang tidak hanya transaksional, tetapi transformatif bagi pembangunan industri strategis nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam fenomena kerja sama diplomasi pertahanan antara Indonesia

dan Turki dalam pengadaan dan pengembangan Medium Tank Harimau. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali kompleksitas hubungan antarnegara, serta menjelaskan konteks, motif, dan dinamika di balik kebijakan pertahanan yang bersifat strategis. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengutamakan pengukuran numerik, pendekatan kualitatif dalam studi ini lebih berorientasi pada pemaknaan dan interpretasi terhadap tindakan aktor negara dalam struktur internasional yang anarkis, sebagaimana diasumsikan dalam paradigma neorealisme.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada kerja sama industri pertahanan antara PT PINDAD (Indonesia) dan FNSS Defense Systems (Turki) dalam proyek pengembangan tank kelas medium bernama Harimau. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis suatu fenomena kontemporer dalam konteks dunia nyata secara mendalam, terutama ketika batas antara fenomena yang dikaji dan konteksnya tidak terlalu jelas. Kasus ini juga dipilih karena mencerminkan kombinasi antara kepentingan strategis, ekonomi, dan teknologi yang menjadi ciri utama dari strategi techno-nationalism negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Dokumen yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan nasional (seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia–Turki), perjanjian bilateral, laporan tahunan kementerian, serta siaran pers resmi dari PT PINDAD dan FNSS Turki. Selain itu, data juga diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan think tank, dan berita daring yang berasal dari media kredibel nasional maupun internasional. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran historis, yuridis, dan empiris dari proyek yang dikaji.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif tematik. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data, yakni pemilahan informasi relevan berdasarkan fokus rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi tematik berdasarkan kerangka teori neorealisme dan techno-nationalism. Setiap temuan dikaitkan dengan konsep-konsep kunci seperti power, wealth, dan prestige yang menjadi indikator dalam strategi techno-nationalism menurut Bitzinger. Setelah itu, peneliti menarik simpulan berdasarkan pola-pola argumentatif yang muncul dari interpretasi data dalam konteks hubungan diplomatik Indonesia–Turki dan pembangunan industri pertahanan nasional.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen, baik yang bersifat resmi (seperti dokumen pemerintah) maupun analitik (seperti publikasi akademik), guna memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks politik dan ekonomi yang melatarbelakangi kerja sama tersebut, guna menghindari bias dan penyederhanaan berlebihan terhadap realitas yang kompleks.

Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini dibatasi pada periode 2019–2024, yakni masa implementasi kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam proyek Harimau. Pembatasan waktu ini dipilih untuk menangkap dinamika mutakhir kerja sama yang masih berlangsung dan terus berkembang. Secara spasial, fokus penelitian terbatas pada interaksi bilateral yang

melibatkan pemerintah, BUMN pertahanan, dan institusi strategis kedua negara, dengan penekanan pada kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan diplomasi pertahanan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan luar negeri dan membangun kemandirian alutsista berbasis kerja sama teknologi.

## PEMBAHASAN

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan Medium Tank Harimau mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Indonesia dari semata-mata pengadaan alutsista menjadi diplomasi berbasis penguatan kapabilitas strategis nasional. Dalam pembahasan ini, kerja sama tersebut dianalisis melalui perspektif neorealisme dan kerangka techno-nationalism yang menekankan motif kekuatan (*power*), keuntungan ekonomi (*wealth*), dan prestise (*prestige*) sebagai pendorong utama kebijakan negara.

Neorealisme menjelaskan bahwa negara sebagai aktor rasional dalam sistem internasional akan memaksimalkan keamanannya melalui peningkatan kapabilitas militer. Dalam konteks ini, Indonesia melihat kerja sama dengan Turki bukan hanya sebagai transaksi ekonomi, tetapi sebagai sarana strategis untuk memperkuat posisi regionalnya di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Ketika akses terhadap teknologi militer canggih dari negara Barat kerap kali dibatasi oleh regulasi ekspor dan pertimbangan geopolitik, kerja sama dengan negara mitra seperti Turki membuka ruang baru bagi Indonesia untuk memperoleh akses teknologi sekaligus membangun kemandirian industri pertahanan.

Dari sudut pandang techno-nationalism, Indonesia berupaya memperkuat industri pertahanan domestik melalui transfer teknologi dan produksi bersama. Kolaborasi PT PINDAD dengan FNSS Turki dalam pengembangan Harimau menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan tidak lagi terbatas pada pembelian produk jadi, tetapi mengarah pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menekankan pentingnya kemandirian dan keberlanjutan industri pertahanan nasional. Menariknya, kerja sama ini juga didesain dalam skema produksi modular, di mana sebagian komponen kritis tetap diimpor sementara komponen non-kritis mulai dilokalisasi, memberikan peluang bertahap bagi Indonesia untuk menaikkan kemampuan manufaktur pertahanannya.

Keuntungan ekonomi dari kerja sama ini tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi biaya pengadaan, tetapi juga dari dampak multiplikasi terhadap ekosistem industri lokal. Keterlibatan industri dalam negeri dalam proyek Harimau mendorong pertumbuhan teknologi manufaktur militer, menciptakan lapangan kerja terampil, dan memperluas pasar ekspor potensial di masa depan. Dalam hal ini, Harimau berfungsi sebagai simbol strategi techno-nationalism yang menjembatani kepentingan keamanan nasional dengan pertumbuhan ekonomi strategis. Di sinilah diplomasi pertahanan berbasis industri memainkan peran ganda sebagai kebijakan luar negeri sekaligus instrumen pembangunan nasional. Jika dibandingkan dengan kerja sama

pertahanan Indonesia dengan negara lain, seperti proyek pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan, pendekatan dalam kerja sama dengan Turki terlihat lebih realistis dan adaptif terhadap kapasitas domestik. Dalam proyek KFX/IFX, Indonesia menghadapi tantangan dalam komitmen pendanaan dan pembagian teknologi yang ketat, yang pada akhirnya memunculkan ketegangan bilateral. Sementara itu, kerja sama dengan Turki lebih menekankan pada penguatan BUMN pertahanan secara bertahap dan fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai belajar menyesuaikan model kerja sama pertahanan dengan konteks kemampuan dalam negeri.

Kerja sama ini juga membawa dimensi prestise yang signifikan. Dalam kancah internasional, keberhasilan Indonesia memproduksi dan mengeksport alutsista hasil kolaborasi teknologi menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya konsumtif dalam bidang pertahanan, tetapi juga produktif dan inovatif. Produk seperti Harimau menjadi alat diplomasi simbolik yang meningkatkan citra Indonesia di mata negara-negara berkembang lainnya, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam forum pertahanan multilateral seperti ADMM-Plus dan IDEX. Citra ini menjadi aset politik luar negeri yang penting dalam membangun kredibilitas sebagai negara demokrasi berkembang yang mampu mengelola teknologi strategis.

Namun demikian, pembahasan ini juga mengidentifikasi tantangan struktural yang mengiringi pelaksanaan diplomasi pertahanan berbasis teknologi. Salah satunya adalah ketimpangan dalam penguasaan teknologi antara Indonesia dan mitra luar negeri, yang berpotensi menciptakan ketergantungan baru jika tidak disertai dengan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia dan riset domestik. Selain itu, faktor birokrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta resistensi terhadap perubahan di lingkungan BUMN strategis menjadi hambatan internal yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi pertahanan tidak hanya bergantung pada negosiasi eksternal, tetapi juga pada kesiapan struktur dalam negeri untuk menyerap dan mengembangkan teknologi secara mandiri.

Aspek penting lain yang belum banyak diperhatikan dalam diskursus publik adalah relasi antara kebijakan diplomasi pertahanan dan politik domestik. Dukungan politik dari Kementerian Pertahanan, keterlibatan aktif Komisi I DPR RI dalam pengawasan anggaran, serta orientasi kebijakan Presiden terhadap kemandirian industri pertahanan, turut memengaruhi arah dan keberhasilan proyek ini. Oleh sebab itu, keberlanjutan kerja sama seperti Harimau sangat bergantung pada stabilitas politik nasional dan konsistensi arah kebijakan lintas pemerintahan.

Secara keseluruhan, kerja sama Indonesia-Turki dalam proyek Harimau merepresentasikan transformasi strategi diplomasi pertahanan Indonesia ke arah yang lebih otonom, terintegrasi, dan berpandangan jauh ke depan. Dengan menjadikan alutsista sebagai medium untuk mencapai power, wealth, dan prestige, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya secara militer, tetapi juga secara ekonomi dan simbolik dalam tatanan global yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan model kerja sama serupa yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga mendorong ekosistem inovasi dan teknologi dalam negeri secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kerja sama Indonesia dan Turki dalam pengembangan Medium Tank Harimau menunjukkan arah baru dalam diplomasi pertahanan Indonesia yang lebih berorientasi pada kemandirian, penguasaan teknologi, dan sinergi antara kebijakan luar negeri dengan pembangunan industri nasional. Artikel ini menegaskan bahwa diplomasi pertahanan tidak semata menjadi instrumen militer, melainkan juga alat strategis dalam menggapai tujuan nasional, termasuk dalam ranah ekonomi dan simbolik.

Melalui pendekatan neorealisme dan kerangka techno-nationalism, penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia mengejar tiga tujuan utama dalam kerja sama ini: kekuatan militer (power), manfaat ekonomi strategis (wealth), dan peningkatan prestise internasional (prestige). Ketiga aspek ini saling terkait dalam mendorong Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap alutsista asing, membangun kapasitas produksi dalam negeri melalui alih teknologi, serta menampilkan citra sebagai negara produsen pertahanan yang kredibel di mata komunitas global.

Namun demikian, keberhasilan kerja sama ini juga bergantung pada faktor internal, seperti konsistensi kebijakan, tata kelola industri pertahanan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa perbaikan struktural di dalam negeri, diplomasi pertahanan hanya akan bersifat simbolik tanpa memberi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang holistik untuk mendukung kelanjutan kerja sama pertahanan strategis, termasuk pembangunan ekosistem riset dan inovasi, peningkatan kapasitas PT PINDAD, serta integrasi antara lembaga teknis, militer, dan sipil.

Secara konseptual, artikel ini juga mengajukan refleksi kritis terhadap pendekatan techno-nationalism yang digunakan. Meskipun mampu menjelaskan motif ekonomi dan simbolik di balik kerja sama pertahanan, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek politik domestik yang sering kali memengaruhi implementasi kerja sama jangka panjang. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk menggabungkan pendekatan politik domestik dan analisis institusional guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika diplomasi pertahanan Indonesia di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Aguilar, A. G. (2008). Peri-urbanization, illegal settlements and environmental impact in Mexico City. *Cities*, 25(3), 133–145. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.02.003>

Bitzinger, R. A. (2015). Modernizing China's defense industry. *Journal of Strategic Studies*, 38(6), 764–786. <https://doi.org/10.1080/01402390.2014.1002916>

Sari, K. D. R., & Santoso, E. B. (2017). Analisis Keterkaitan Wilayah Peri Urban di Kabupaten Gresik dengan Wilayah Desa-Kota di Sekitarnya. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 2–7. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24971>

Yulisman, L. (2020). Indonesia to continue collaboration on KFX fighter jet project with South Korea. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/>

### **Buku/Disertasi**

Neuman, W. L. (1991). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed.). Whitewar, United States: Allyn and Bacon.

Nur, T. (2008). *Verba dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia: studi gramatika kontrasif*. (Unpublished Dissertation). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Van Winkle, C. (2009). *Soft spots: A marine's memoir of combat and post-traumatic stress disorder*. St. Martin's Press.

### **Laporan/Artikel/Media**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2020*. Jakarta: Kemhan RI.

Tempo. (2023). Produksi Tank Harimau Indonesia–Turki Masuki Tahap Uji Tembak. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/>